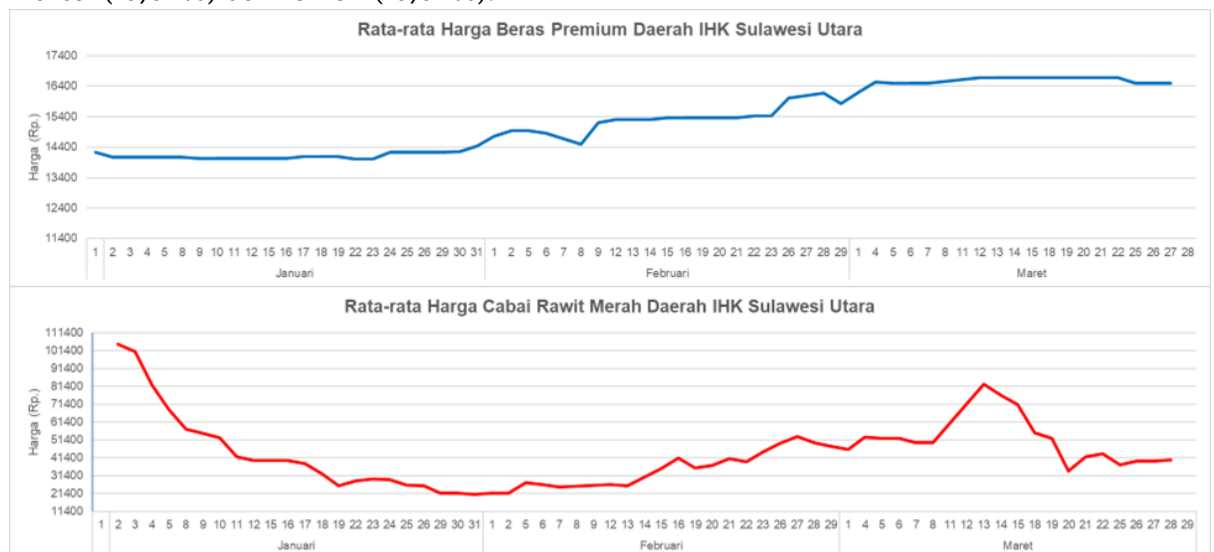


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- Pada Triwulan I 2024, harga berbagai barang umumnya naik. Berdasarkan pemantauan BPS Provinsi Sulawesi Utara di 4 (empat) kabupaten/kota, terjadi kenaikan inflasi tahun ke tahun (*year-on-year, yoy*) sebesar 3,82 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 106,81 pada Maret 2023 menjadi 106,83 pada Maret 2024. Inflasi bulanan sebesar 1,07 persen, sementara inflasi tahun ke hari (*month-to-date, mtm*) sebesar 0,02 persen. Berdasarkan 4 kabupaten/kota pencatatan IHK, Kota Manado tercatat inflasi 1,10% (mtm) atau 2,62% (yoy), Kota Kotamobagu tercatat inflasi 1,72% (mtm) atau 3,52% (yoy), Kabupaten Minahasa Selatan tercatat inflasi 0,53% (mtm) atau 6,29 (yoy) dan Kabupaten Minahasa Utara tercatat inflasi 1,10% (mtm) atau 5,87 (yoy).
- Secara tahun ke tahun, komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada triwulan I antara lain beras (1,63%), daging babi (0,75%), daun bawang (0,19%), Sigaret Kretek Mesin (SKM) (0,15%), dan angkutan udara (0,15%). Sedangkan komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain: tomat (-0,22%), cabai rawit (-0,20%), ikan cakalang/ikan sisik (-0,09%), ikan selar/ikan tude (-0,06%) dan celana panjang katun pria (-0,03%).
- Sementara itu, secara bulan ke bulan komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m antara lain beras (0,78%), cabai rawit (0,43%), angkutan udara (0,12%), telur ayam ras (0,06%) dan kue basah (0,05%). Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain tomat (-0,44%), daun bawang (-0,14%), bawang merah (-0,09%), wortel (-0,02%) dan lemon (-0,01%).



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kenaikan harga beras disebabkan keterbatasan pasokan beras yang diterima dari luar wilayah Sulut dan kondisi lahan padi di Bolaang Mongondow Raya yang belum memasuki masa panen. Pada minggu terakhir Maret harga beras mulai menunjukkan penurunan yang dipengaruhi dimulainya kegiatan panen raya se-Indonesia serta keputusan Pemerintah menerapkan relaksasi HET beras premium mulai 10 Maret sampai 23 April 2024.

Selama triwulan I, semua jenis cabai mengalami fluktuasi bulanan. Setelah mengalami penurunan drastis pasca masa HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, cabai kembali

mengalami tren kenaikan hingga minggu II Maret. Hal ini disebabkan oleh pengaruh iklim dengan curah hujan belum merata namun tinggi di daerah tertentu. Curah hujan tinggi membuat tanaman cabai rentan terkena penyakit sehingga menyulitkan petani dalam melakukan pemeliharaan sehingga berpengaruh terhadap produksi. Kenaikan juga disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari luar Sulawesi Utara khususnya dari Provinsi Gorontalo yang mengalami kekurangan tenaga pemetik saat memasuki bulan puasa.

Bulan Maret terjadi peningkatan lalu lintas angkutan udara di Bandara Sam Ratulangi sejumlah 54.968 penumpang untuk kedatangan domestik dan 57.866 penumpang untuk keberangkatan dibanding dengan Februari masing-masing 3.973 dan 4.294 penumpang. Harga avtur sendiri mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp. 15.615,39 pada bulan Februari menjadi Rp. 16.060,59 pada bulan Maret. Meningkatnya permintaan dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat.

Kenaikan harga telur ayam ras dipengaruhi kenaikan harga jagung hingga Februari karena kurangnya produksi sebagai dampak El Nino. Kurangnya persediaan dan meningkatnya harga jagung sejak akhir 2023 juga membuat peternak terpaksa melakukan afkir dini sampai 30% dari populasi ayam petelur untuk menekan biaya produksi.

Untuk kue basah, kenaikan harga yang terjadi berkaitan erat dengan tingginya permintaan pada bulan Ramadhan sebagai salah satu pelengkap makanan untuk berbuka puasa.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya pengendalian inflasi Januari 2024

- Koordinasi dan sosialisasi penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah tahap I Januari-Maret 2024, 9 Januari.
- Evaluasi TPID Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023, 17 Januari.
- Koordinasi dengan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan terkait data keluar masuk komoditas pangan Sulawesi Utara.
- *High Level Meeting* Rapat Koordinasi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, 31 Januari.
- *Capacity Building* TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, 31 Januari.
- Rapar Koordinasi Mingguan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
- Satu data pemantauan harga harian 15 Kabupaten/Kota.

Upaya pengendalian inflasi Februari 2024

- Gerakan ASN dan THL Menanam lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulut, 2 Februari.
- Penyediaan benih jagung dimana Sulut menjadi lokasi Reprioritas dan mendapat alokasi pengadaan langsung dari Satker Kementan Pusat 30.000 ha dan reguler 3000 ha, 18 Februari.
- Pembinaan penangkar padi lokal dari petani oleh petani & untuk petani untuk memenuhi kebutuhan benih padi di MT 2 2024, kolaborasi dengan swadaya petani penangkar (KUR) kegiatan Korporasi Padi MT 1, 18 Februari.
- Sinergi TPID terkait minyak goreng curah, 20 Februari.

Launching dan Monitoring Gerakan Pangan Murah di Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, 21 Februari.

- Koordinasi dengan Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan terkait akses BBM untuk nelayan, 22 Februari.
- Edukasi pada peternak dan penyemprotan kandang babi untuk mencegah penyebaran virus ASF.
- Penandatanganan MoU Unit Pengolahan Ikan Sulut dengan USAID Ber-IKAN, 23 Februari.
- Penanaman jagung seluas 3 ha di Minahasa Utara bekerja sama dengan Bank Prisma Dana, 24 Februari.
- Upaya penyediaan pasokan komoditas pertanian dan perkebunan.
- Pemantauan harga di Pasar Ratahan oleh Pemkab Minahasa Tenggara dan BPS Sulawesi Utara.
- Rapar Koordinasi Mingguan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
- Satu data pemantauan harga harian 15 Kabupaten/Kota.

Upaya pengendalian inflasi Maret 2024

- Sidak dan Operasi pasar menyalurkan 20 ton beras SPHP ke Pasar Bersehati, 2 Maret 2024.
- Penandatanganan Nota Kesepahaman perluasan areal tanam padi melalui kegiatan pompanisasi, 8 Maret.
- Alokasi *Mantap* (Mandiri Benih Tanaman Pangan) padi sebesar 200 ha (Mitra 30 ha, Bolmong 100 ha, Bolmut 30 ha, Minsel 20 ha dan Minut 20 ha), 14 Maret.
- Upaya penyediaan pasokan komoditas pertanian dan perkebunan.
- Diskusi dengan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Prov. Sulawesi Utara terkait kenaikan harga telur ayam ras, 20 Maret.
- Sosialisasi budidaya ternak kambing, sapi dan babi serta persiapan peluncuran Program Community ASF Biosecurity Intervention (CABI) hasil kerja sama dengan Kementan dan FAO, 20 Maret.
- Pemantauan kegiatan bongkar muat Beras Bulog ex-Pakistan sebanyak 11.200 ton, 21 Maret.
- Sidak pasar di Kab. Minahasa Tenggara, 26 Maret.
- Monitoring dan evaluasi Gerakan ASN Menanam menjelang HBKN, 27 Maret.
- Gerakan pangan murah menjelang HBKN Paskah dan Idul Fitri di Kab/Kota, 27 Maret.
- Rapar Koordinasi Mingguan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

Satu data pemantauan harga harian 15 Kabupaten/Kota.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan kerja sama yang efektif dalam mengawasi serta mengevaluasi langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi. Ini mencakup pengawasan terhadap produksi dan pasokan di tahap awal, serta distribusi barang-barang pokok dan barang strategis lainnya ke konsumen.

Pada awal Maret menanggapi kenaikan harga beras dan cabai, TPID Provinsi Sulawesi Utara

◦

berkoordinasi dengan distributor cabai kemudian melaksanakan sidak pasar serta operasi pasar dengan menyalurkan 20 ton beras SPHP.

Menanggapi lonjakan harga telur ayam ras, TPID Provinsi Sulawesi Utara berdiskusi dengan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Provinsi Sulawesi Utara untuk mengetahui permasalahan dan mencari pemecahan atas kenaikan harga yang terjadi.

Setiap minggu, TPID Provinsi Sulawesi Utara mengadakan rapat koordinasi secara teratur bersama TPID Kabupaten/Kota untuk memantau perkembangan harga di pasar serta membahas strategi pengendalian inflasi yang telah dan akan dilaksanakan. Upaya yang dilakukan di antaranya dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran yang terkait dengan pengendalian inflasi.

Evaluasi juga dilakukan terhadap realisasi pelaksanaan kesepakatan tindak lanjut arahan Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 oleh pemerintah daerah se-Sulawesi Utara. Beberapa daerah telah menyampaikan laporan tindak lanjut yang terangkum pada Tabel 1.

Dalam rangka memperkuat sinergi dengan TPID Kabupaten/Kota, TPID Provinsi Sulawesi Utara melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara pada Triwulan I 2024 telah melaksanakan tiga *High Level Meeting* (HLM). HLM pertama pada bulan Januari difokuskan pada penyusunan rencana strategis yaitu *roadmap* yang mempertimbangkan tantangan, keunggulan dan ciri khas masing-masing daerah; serta optimalisasi penggunaan anggaran dana desa untuk pengendalian inflasi dengan mengalokasikan 20% anggaran.

Pada akhir Februari dilaksanakan HLM TPID Kabupaten se-Minahasa Raya, Kota Tomohon dan Kota Bitung dirangkaikan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Utara. Tujuan acara ini adalah untuk menyajikan pilot project pengendalian inflasi dalam konteks GNPIP 2024 hasil sinergi BI dan TPID Kabupaten/Kota.

HLM ketiga ditujukan untuk wilayah Bolaang Mongondow Raya termasuk Kota Kotamobagu. dan difokuskan pada penyusunan langkah-langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang bulan Ramadhan serta Hari Besar Keagamaan (HBKN) Paskah dan Idul Fitri.

Sinergi dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah yang telah dilakukan sepanjang triwulan I dalam rangka pengendalian inflasi baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mampu menjaga angka inflasi Sulawesi Utara dalam rentang target inflasi nasional.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Sinergi program unggulan GNPIP 2024 yaitu (i) operasi pasar/pasar murah; (ii) memperkuat ketahanan pangan strategis melalui program hilirisasi dan pengembangan subsisten untuk sisi hilir; (iii) transformasi budaya pangan strategis dan digital farming untuk sisi hulu; (iv) perluasan kerja sama antar daerah (KAD); (v) fasilitasi distribusi pangan; (vi) penguatan TIK; dan (vii) koordinasi dan komunikasi.
- Optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran terkait pengendalian inflasi termasuk pemanfaatan 20% dana desa untuk penguatan ketahanan pangan.
- Antisipasi fenomena La Nina terutama untuk komoditas pangan yang rentan terhadap curah hujan yang tinggi.